

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, telah banyak perkembangan pesat yang terjadi dalam dunia bisnis termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Perusahaan selalu mengikuti perkembangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu perusahaan di mata investor. Pelaporan keuangan merupakan langkah yang diambil perusahaan untuk memberikan informasi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Penerbitan pelaporan perusahaan tentunya terdiri dari laporan keuangan dan laporan non-keuangan berdasarkan standar akuntansi yang diterapkan. Informasi tambahan dalam bentuk informasi non-keuangan terbukti memiliki nilai relevan yang bisa digunakan oleh pemangku kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Dhaliwal, Li, Tsang, Yang, 2011). Seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya kebutuhan pengambilan keputusan atas suatu perusahaan menimbulkan isu baru dalam akuntansi. Laporan keuangan tidak hanya memenuhi informasi investor dan kreditor dalam kapasitasnya sebagai penyedia sumber daya keuangan perusahaan, tetapi laporan keuangan juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efek keberadaan perusahaan pada lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pada tahun 2013 *International Integrated Reporting Council* (IIRC) mengembangkan model pelaporan baru yang dinamakan "*Integrated Reporting*" (IR) atau biasa disebut pelaporan terintegrasi. Pelaporan terintegrasi merupakan sebuah solusi baru dalam mengukur dan mengkomunikasikan penciptaan nilai perusahaan. Konsep inti dari penyajian pelaporan terintegrasi adalah menyediakan satu laporan yang sepenuhnya mengintegrasikan informasi keuangan dan non keuangan perusahaan seperti lingkungan, tata kelola, dan isu sosial (Krszus, 2010). Pelaporan terintegrasi berbeda dengan pelaporan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) dimana pelaporan berkelanjutan ini membahas tentang aktivitas perusahaan terkait dengan ekonomi, lingkungan, dan

sosialnya yang penyajiannya terpisah dengan laporan tahunan, sedangkan pelaporan terintegrasi menyajikan dalam satu laporan secara terpadu (Juniantari, 2018).

Saat ini pelaporan terintegrasi di Indonesia masih tergolong baru, dan belum ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan ini. Oleh karena itu pelaporan terintegrasi ini masih dikategorikan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), sehingga perusahaan yang menerbitkan pelaporan terintegrasi di Indonesia masih tergolong sedikit, karena penerapannya baru dimulai akhir tahun 2014. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak bersifat wajib, namun dengan adanya pengungkapan ini akan sangat membantu investor dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan (Wardani, 2012).

Pelaporan terintegrasi bermanfaat bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan menerapkan strategi keberlanjutan yang akan membantu investor untuk menentukan keputusan investasi dalam jangka panjang (Eccles dan Saltzman, 2011). Manfaat lain dari pelaporan terintegrasi yaitu untuk meningkatkan transparansi di dalam aktivitas operasi perusahaan, dimana dengan meningkatnya transparansi, maka perusahaan dapat meningkatkan rasa kepercayaan pemangku kepentingan (Utami, 2016). Hal ini diperkuat dengan pendapat mengenai perusahaan yang menggunakan konsep-konsep pelaporan terintegrasi dimungkinkan menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat meningkatkan akses perusahaan dalam mendapatkan modal (Coopers, 2013).

Penyampaian informasi secara transparan dapat didorong dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan. Transparansi mengarahkan perusahaan untuk menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan dengan prinsip transparansi yang baik dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Salah satu struktur tata kelola perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris (Peraturan OJK No.33 tahun 2014 pasal 20). Komisaris independen bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Ratnasari, 2011). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Komisaris independen yang tidak terpengaruh oleh manajemen cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan transparan pada para pemangku kepentingan. Dengan demikian semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan maka dapat mendorong pengungkapan informasi yang transparan, dimana dengan adanya informasi yang bersifat transparansi, perusahaan dapat terhindar dari adanya asimetri informasi dan mendorong perusahaan untuk menerbitkan pelaporan terintegrasi (IR).

Komite audit merupakan struktur tata kelola yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga tidak melakukan penyelewengan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen yang lebih efektif dan efisien serta mendorong peningkatan pengungkapan informasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut tentunya dapat mendukung perusahaan dalam menghindari asimetri informasi dan mendorong mempublikasikan pelaporan terintegrasi (IR).

Kepemilikan institusional juga merupakan struktur penting dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti: perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan manajemen aset (Sari, Sutrisno, dan Sukaharsono, 2013). Pihak institusional ini dapat berperan dalam pengawasan perusahaan sehingga mengurangi penyelewengan yang dilakukan menejer, sehingga diharapkan juga dapat

mengurangi asimetri informasi. Kepemilikan institusional merupakan salah satu struktur dalam tata kelola perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam pelaporan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang besar diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan pelaporan terintegrasi (IR), sehingga perusahaan dapat memberikan informasi yang transparan dan luas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan terhindar dari asimetri informasi.

Asimetri informasi merupakan pemberian informasi yang tidak seimbang antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak mendapatkan informasi yang berlebih, hal ini akan membuat kepercayaan investor menurun bagi perusahaan karena manajemen lebih mengetahui informasi dalam perusahaan dibandingkan investor (Aristianti dkk, 2017). Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* maupun *moral hazard* (Aziz, 2014). Asimetri informasi mempunyai hubungan dengan pelaporan terintegrasi dan struktur tata kelola perusahaan, dimana untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya asimetri informasi maka perusahaan perlu untuk menerapkan pelaporan perusahaan yang lengkap, transparan, dan berkualitas bukan hanya dari aspek keuangan saja, namun juga dari aspek non keuangan, dalam hal ini adalah pelaporan terintegrasi. Penyampaian informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dapat didorong dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, dimana dengan adanya transparansi maka perusahaan lebih dapat dipercaya oleh pihak pemangku kepentingan dan perusahaan dapat terhindar dari asimetri informasi.

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan laporan perusahaan menggunakan pelaporan terintegrasi (IR) dan pengaruh asimetri informasi terhadap pelaporan terintegrasi, serta tata kelola perusahaan telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Novaridha (2017) melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh kepemilikan institusional, terhadap elemen-elemen pelaporan terintegrasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap elemen-elemen pelaporan terintegrasi dalam laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Khairina (2018) membahas mengenai pengaruh elemen-elemen pelaporan terintegrasi terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, tata kelola, peluang dan resiko, strategi dan alokasi sumber daya, model bisnis, kinerja, tampilan masa depan sebagai variabel independen untuk mendapatkan wawasan tentang apakah elemen-elemen pelaporan terintegrasi mempengaruhi asimetri informasi. Temuan dari penelitian ini yaitu, hanya pengungkapan resiko dan peluang berpengaruh negatif signifikan terhadap asimetri informasi, sedangkan tata kelola, model bisnis, gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, strategi dan alokasi sumber daya, kinerja, dan tampilan masa depan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi.

Hasil penelitian Habbash (2015) menunjukkan bahwa variabel komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Penelitian lain oleh Kusuma dkk. (2014) menyatakan bahwa proporsi komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di dalam pelaporan terintegrasi. Ahmad (2017) menemukan bahwa proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, tidak berpengaruh terhadap laporan tahunan dengan rerangka pelaporan terintegrasi, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap laporan tahunan dengan rerangka pelaporan terintegrasi. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan laporan perusahaan menggunakan pelaporan terintegrasi menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan karena perbedaan sampel dan pedoman penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong penelitian ini untuk menguji kembali apakah struktur tata kelola perusahaan cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan terutama dalam pengungkapan pelaporan terintegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur tata kelola perusahaan dan asimetri informasi terhadap pelaporan terintegrasi. Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Alasan peneliti memilih periode tersebut karena pelaporan terintegrasi merupakan pelaporan yang masih tergolong baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2013, sehingga perusahaan yang ingin menerapkan pelaporan terintegrasi baru bisa menerapkan pelaporan terintegrasi pada tahun 2014. Objek penelitian ini dipilih karena selain pelaporan terintegrasi merupakan pelaporan yang masih baru diterapkan, penelitian tentang pelaporan terintegrasi juga belum banyak diteliti, khususnya komponen struktur tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pelaporan terintegrasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi ?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh pada pelaporan terintegrasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap pelaporan terintegrasi.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap pelaporan terintegrasi.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pelaporan terintegrasi.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap pelaporan terintegrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya kesiapan pada penerapan pelaporan terintegrasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi, literatur ataupun perbandingan agar dikembangkan lebih jauh untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaporan terintegrasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan investor mengenai tata kelola perusahaan yang baik, terutama pada struktur tata kelola perusahaan dan penerapan pelaporan terintegrasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab lima berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran.